# Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kajian Yuridis dan Konseptual

Oleh: Herry Widyastono")

Abstrak: Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat; ada yang pro, ada pula yang kontra. Kebijakan tersebut antara lain mengenai pergantian kurikulum. Yang kontra beranggapan bahwa setiap ganti menteri ganti pula kurikulum; misalnya, Kurikulum 2004 belum dipahami sepenuhnya, sudah diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemberlakuan KTSP merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI & SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, pemberlakuan KTSP juga merupakan penerapan dari berbagai teori pengembangan kurikulum. KTSP, ditinjau dari model kurikulum, merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi; ditinjau dari model pengelolaan pengembangan kurikulum, merupakan penerapan model pengelolaan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan; ditinjau dari model implementasi kurikulum, merupakan penerapan gabungan model implementasi kurikulum mutual adaptive dan enachment.

Kata Kunci: kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kajian yuridis, kajian konseptual, model kurikulum, model pengelolaan pengembangan kurikulum, model implementasi kurikulum.

Dr. Herry Widyastono, Peneliti Madya Bidang Pendidikan, saat ini juga sebagai Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Khusus pada Pusat Kurikulum – Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas

### 1. Pendahuluan

Sering kita dengar ungkapan "ganti menteri ganti kurikulum"; Kurikulum 2004 baru saja diterapkan dan bahkan sekolah yang banyak memahaminya sehingga belum menerapkannya, sudah ganti lagi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Akibatnya. karena kekurangpahaman alasan penggantian kurikulum, ada orang yang dengan sinis memplesetkan istilah KTSP dengan sebutan KaTe SiaPe? (bahasa Betawi), atau Kurikulum Terserah Sampeyan Piyambak (bahasa Jawa), serta istilah plesetan lainnya.

Ungkapan ganti menteri ganti kurikulum sebenarnya kurang tepat. Pergantian menteri biasanya 5 tahun sekali, sedangkan pergantian kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berkisar sekitar 10 tahun sekali. Kurikulum 2004 merupakan pengganti Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 pengganti Kurikulum 1984, Kurikulum 1984 pengganti Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1975 pengganti Kurikulum 1968. Istilah pergantian kurikulum sebenarnya juga kurang tepat. Lebih tepat dengan istilah penyesuaian kurikulum, yakni penyesuaian dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di negara maju, pada umumnya kurikulum pendidikan dasar dan menengah disesuaikan paling lama dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Bahkan di Inggris, kurikulum dapat diganti setiap saat; oleh karena itu, dokumen kurikulum di Inggris tidak dibundel, melainkan hanya dimasukkan ke dalam odner, sehingga bagian-bagian tertentu dari isi kurikulum yang sudah dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicabut kemudian diganti dengan yang sesuai (Widyastono, 1991). Dengan demikian isi kurikulum selalu dapat diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkenaan dengan kekurangpahaman masyarakat tentang adanya pergantian/penyesuaian kurikulum tersebut, di bawah ini diuraikan kajian yuridis dan konseptual pemberlakuan KTSP.

### 2. Pembahasan

# 2.1 Pengembangan Kurikulum

Di Indonesia, kebijakan penyesuaian kurikulum dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun sekali. Hal ini dilakukan agar isi kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, dalam

dokumen Kurikulum 1994 diajarkan materi Program Wordstar-4 (WS-4) dan Wordstar (WS-7) untuk mata pelajaran komputer. Apabila guru saat ini masih mengajarkan materi tersebut kepada para peserta didiknya, dapat dipastikan guru tersebut akan kesulitan sendiri mencari Program WS-4 dan WS-7 di lapangan. Contoh lain, disebutkan pula bahwa Indonesia terdiri atas 26 provinsi dan ASEAN terdiri atas 5 negara. Kenyataannya saat ini sudah tidak demikian. Selain itu, juga disebutkan bahwa musim hujan di Indonesia antara bulan Oktober sampai dengan April, sedangkan musim kemarau antara April sampai dengan Oktober. Kenyataannya, saat ini musim hujan dan kemarau tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kalau guru masih mengajarkan kepada para peserta didiknya sesuai dengan isi Kurikulum 1994, berarti guru tersebut justru akan membodohi peserta didiknya.

Masih banyak lagi contohcontoh materi Kurikulum 1994 yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tidak salah bahwa Pemerintah harus selalu melakukan penyesuaian kurikulum, karena memang kurikulum harus selalu diperbarui. Berkenaan dengan hal ini, Hamid Hasan (2000), mengemukakan bahwa "kurikulum baik pada zamannya". Ketika kita berada pada tahun 80-an, Kurikulum 1984 adalah yang terbaik dibanding kurikulum-kurikulum sebelumnya, karena kurikulum-kurikulum sebelumnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu, alias sudah ketinggalan zaman (out of date)

Sementara itu, ketika kita berada pada tahun 90-an, Kurikulum 1994 adalah yang terbaik dibanding kurikulum-kurikulum sebelumnya, demikian pula seterusnya. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda "Hendaklah kita mengajar anak kita sesuai dengan zamannya" (Savitri, 2007).

Dengan demikian, kurikulum memang harus selalu disesuaikan dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kurikulum juga harus berwawasan ke depan dan relevan dengan kebutuhan (Arismunandar, 1996).

# 2.2 Kajian Yuridis

Kurikulum 1994 dan kurikulumkurikulum sebelumnya sifatnya sentralistik, sesuai dengan era pengelolaan pemerintahan saat itu. Kurikulum disusun oleh Pemerintah (Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan – Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), guru tinggal mengimplementasikannya di sekolah masingmasing.

Seiring dengan perubahan pengelolaan pemerintahan, yang memasuki era desentralisasi, otonomi daerah, diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan, berupa desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan, dan otonomi sekolah. maka kurikulum yang sifatnya sentralistik, seperti Kurikulum 1994 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi sekolah. Dengan Kurikulum 1994 yang sentralistik, di mana satu kurikulum diberlakukan untuk semua peserta didik dari ujung timur sampai ujung barat, berarti potensi dan kemampuan peserta didik dari ujung timur sampai ujung barat seolah-olah dianggap sama. Padahal, kenyataannya potensi dan kemampuan setiap peserta didik berbeda satu sama lain, berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain; dan yang paling tahu

potensi dan kemampuan setiap peserta didik adalah guru-guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang paling ideal menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini adalah para guru yang bersangkutan. Hal inilah antara lain yang mendasari perlunya penyesuaian Kurikulum 1994.

Di sisi lain, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional antara lain untuk: (1) melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat serta jenis pendidikan secara profesional; dan (2) melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen (TAP MPR RI Nomor IV/ MPR/1999).

Menindaklanjuti hal itu, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas mulai mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, yang pada tahun 2001 mulai dilakukan piloting pada 54 sekolah dari provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya, pada tahun 2003 diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa salah satu strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu, pada tahun 2004 piloting kurikulum berbasis kompetensi diperluas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya kurikulum tersebut diberi istilah Kurikulum 2004.

Tujuan piloting antara lain untuk mendapatkan umpan-balik (feedback) dari para pelaksana pendidikan di lapangan tentang bagian-bagian kurikulum yang sulit dilaksanakan maupun sulit dipahami oleh guru di lapangan. Berdasarkan masukan dari sekolah-sekolah piloting tersebut, rencananya semula akan dilakukan penyempurnaan, baru kemudian akan disyahkan menteri.

Namun, pada tahun 2005 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP 19/2005 tersebut mengatur tentang kurikulum pendidikan dan mengamanatkan bahwa kurikulum satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan, yang disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Oleh karena itu, dokumen Kurikulum 2004 kemudian disempurnakan, mengacu pada masukan dari lapangan dan tuntutan PP 19/ 2005, dan selanjutnya istilah Kurikulum 2004 diganti dengan Standar Isi (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yang disyahkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006; dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yang disyahkan dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006

Mengacu pada SI dan SKL ini, satuan pendidikan bersama komite sekolah diharapkan mampu mengembangkan sendiri KTSP, dan dapat menerapkannya mulai tahun 2006 di kelas 1 dan 4 untuk SD, dan kelas 1 untuk SMP, SMA, maupun SMK. Bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2004 pada semua kelas, dapat menerapkan KTSP secara serempak pada semua kelas juga (Permendiknas Nomor 24

Tahun 2006), karena SI dan SKL yang dipakai acuan dalam pengembangan KTSP bahan dasarnya adalah Kurikulum 2004.

Pengembangan KTSP sesuai dengan: (1) Tujuan satuan pendidikan, (2) Potensi daerah/karaktersitik daerah, (3) Sosial budaya masyarakat setempat, dan (4) Peserta didik, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah (UU No. 20/2003).

Satuan pendidikan dan komite sekolah yang merasa belum siap mengembangkan dan menerapkan KTSP mulai tahun 2006, dapat mulai menerapkannya paling lambat pada tahun 2009. Kecuali itu, satuan pendidikan juga dapat mengadaptasi atau mengadopsi model-model kurikulum yang disusun oleh Pusat Kurikulum bersama Direktorat terkait. Namun, setelah masa transisi, semua satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan sendiri KTSP.

Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri kurikulumnya; hal ini merupakan perwujudan dari kebijakan otonomi pendidikan dalam rangka school based management. Namun, kebijakan ini ada yang menganggapnya

merupakan langkah yang terlalu berani mengingat menurut sejarah pendidikan di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial, belum sekalipun satuan pendidikan diberikan kewenangan menyusun sendiri kurikulumnya.

Memang dilematis! Ketika kurikulum disusun oleh Pemerintah, guru tinggal melaksanakannya saja, ada Pengamat pendidikan yang mengomentari bahwa "Guru dianggap seperti Robot oleh Pemerintah, tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya; kurikulum sudah disusun sedemikian rincinva dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), guru tinggal melaksanakannya". Sebaliknya, saat ini ketika guru diberi kewenangan untuk menyusun sendiri KTSP, ada Pengamat pendidikan yang mengomentari bahwa "Pemerintah maunya enaknya sendiri, sudah tahu bahwa guru tugasnya begitu berat, masih juga dibebani dengan tugas menyusun KTSP".

Karena tuntutan peraturan perundangan menghendaki demikian, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, satuan pendidikan harus menyusun sendiri kurikulumnya dan dapat melaksanakannya mulai tahun 2006/2007 dan paling lambat tahun 2009/2010. Namun demikian, satuan

mampu menyusun sendiri KTSP, dapat mengadaptasi atau mengdopsi model-model KTSP yang dikembangkan (tapi tidak dibakukan) oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depaknas bersama Direktorat terkait.

# 2.3 Kajian Konseptual

Kurikulum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum disusun mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum; dan suatu teori kurikulum diturunkan atau dijabarkan dari satu atau beberapa teori pendidikan. Untuk lebih memahami hubungan antara kurikulum dengan pendidikan, dikemukakan beberapa teori pendidikan dan model-model hurikulum dari masing-masing teori tersebut.

Sekurang-kurangnya ada empat teori pendidikan yang dipandang mendasari pengembangan model kerikulum dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan meraksional, dan teknologi penditikan (Lapp, et.al., 1975).

#### Pendidikan Klasik

Pendidikan Klasik dapat dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Konsep pendidikan

ini bertolak dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, konsep atau ide, dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Guru atau para pendidik tidak perlu bersusah payah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai baru, sebab semuanya telah tersedia, tinggal menguasai dan mengajarkannya kepada anak. Teori pendidikan ini disebut juga Teori Transmisi (Seller & Miller, 1984), lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan atau materi diambil dari khasanah ilmu pengetahuan, berupa disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli tempo dulu.

Kurikulum Pendidikan Klasik lebih menekankan kepada isi pendidikan, yang diambil dari disiplin-disiplin ilmu, disusun oleh para ahli tanpa mengikutsertakan guru-guru. Isi disusun secara logis, sistematis, dan berstruktur, dengan berpusatkan

pada segi intelektual, sedikit sekali memperhatikan segi-segi sosial atau psikologis peserta didik. Guru mempunyai peranan yang sangat besar dan lebih dominan dalam pembelajaran. Guru yang aktif dan bertanggungjawab dalam segala aspek pembelajaran. Peserta didik mempunyai peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari guru. Kurikulumnya dapat dikategorikan sebagai Kurikulum Subyek Akademik.

#### b. Pendidikan Pribadi

Berbeda dengan Pendidikan Klasik, Pendidikan Pribadi lebih mengutamakan peranan peserta didik. Konsep Pendidikan Pribadi bertolak dari anggapan dasar bahwa sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi, baik potensi untuk befikir, berbuat, dan memecahkan masalah, maupun potensi untuk belajar dan berkembang sendiri. Pendidikan diibaratkan persemaian, berfungsi menciptakan lingkungan yang menunjang dan terhindar dari hama-hama. Tugas guru seperti halnya petani, mengusahakan tanah yang gembur, pupuk, air, udara, dan sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari tanaman (peserta didik).

Pendidikan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik menjadi subyek pendidikan; dialah yang menduduki tempat utama dalam pendidikan. Pendidik menempati posisi kedua, bukan lagi sebagai penyampai informasi atau sebagai model dan ekspert dalam disiplin ilmu. Ia lebih berfungsi sebagai psikolog yang mengerti segala kebutuhan dan masalah peserta didik. Ia juga berperan sebagai Bidan yang membantu peserta didik melahirkan segala ideidenva. Guru adalah pembimbing, pendorong (motivator), fasilitator, dan pelayan peserta didik.

Kurikulum Pendidikan Pribadi lebih menekankan pada proses pengembangan potensi peserta didik. Materi ajar dipilih yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru-guru dengan melibatkan peserta didik. Tidak ada kurikulum standar, yang ada adalah kurikulum minimal, yang dalam implementasinya dikembangkan bersama peserta didik. Isi dan proses pembelajarannya selalu berubah sesuai dengan minat dan

kebutuhan peserta didik. Kurikulumnya dapat dikategorikan sebagai Kurikulum Pribadi atau Kurikulum Berpusat pada Peserta Didik atau Kurikulum Humanistik.

#### c. Pendidikan Interaksional

Teori ini bertolak dari pemikiran manusia sebagai makluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia selalu membutuhkan manusia lain. selalu hidup bersama, berinteraksi, dan bekeriasama. Karena kehidupan bersama dan kerjasama ini, mereka dapat hidup, berkembang, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Dapat dibayangkan apa yang akan dihadapi seseorang, bila ia hidup sendiri di sebuah pulau terpencil. Bila lingkungannya mendukung, mungkin ia dapat bertahan hidup, tetapi tidak mungkin dapat mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh orang-orang yang hidup bersama dengan orang lain. Dalam Pendidikan Interaksional belajar lebih dari hanya sekedar mempelajari fakta-fakta, Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh, serta memahaminya dalam konteks

kehidupannya. Setiap peserta didik, demikian juga halnya guru, mempunyai rentetan pengalaman dan persepsi sendiri. Dalam proses belajar, persepsi-persepsi yang berbeda tersebut digunakan untuk menyoroti masalah bersama yang muncul dalam kehidupannya. Dalam proses ini, dialog berlangsung, di mana setiap peserta didik dan guru saling mendengarkan, memberikan pendapat, saling mengajar dan belajar. Pemahaman yang muncul dari situasi demikian lebih dari jumlah seluruh sumbangan para peserta didik. Peserta didik bukan hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai guru; dan guru juga pada suatu saat berperan sebagai peserta didik yang turut belajar bersama para peserta didiknya.

Kurikulum Pendidikan Interaksional menekankan baik pada isi maupun proses pendidikan sekaligus. Isi pendidikan terdiri atas problem-problem nyata yang aktual yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat. Proses pendidikannya berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama, baik antarpeserta didik, antara peserta didik dengan guru,

maupun antara peserta didik dan guru dengan sumber-sumber belajar yang lain. Kegiatan penilaian dilakukan baik terhadap hasil maupun proses belajar. Guru-guru melakukan kegiatan penilaian sepanjang kegiatan belajar. Kurikulumnya dikategorikan sebagai Kurikulum Interaksi atau Kurikulum Berpusat pada Masalah atau Kurikulum Rekonstruksi Sosial.

## d. Teknologi Pendidikan

Aliran ini mempunyai persamaan dengan Pendidikan Klasik tentang peranan pendidikan dalam mentransmisi informasi. Tapi, antara keduanya juga ada perbedaan, sebab yang diutamakan oleh Teknologi Pendidikan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama.

Teknologi Pendidikan lebih berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, tidak seperti Pendidikan Klasik yang lebih melihat ke masa lalu. Perkembangan Teknologi Pendidikan dipengaruhi dan sangat diwarnai oleh perkembangan ilmu dan teknologi, sebab Teknologi Pendidikan bertolak dari dan merupakan penerapan prinsip-

prinsip ilmu dan teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah masuk ke semua segi kehidupan, termasuk dalam pendidikan.

Kurikulum Teknologi Pendidikan menekankan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis. Materi disiplin ilmu dipelajari dan termasuk dalam kurikulum, apabila hal itu mendukung penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut. Dalam kurikulum, materi disiplin ilmu tersebut disusun terjalin dalam kemampuan.

Pengembangan kurikulum dilakukan oleh para ahli dan/atau guruguru yang mempunyai kemampuan mengembangkan kurikulum. Perangkat kurikulum cukup lengkap, mulai dari struktur dan sebaran mata pelajaran sampai dengan rincian bahan ajar yang dipelajari oleh peserta didik, yang tersusun dalam satuan-satuan bahan ajar dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, paket belajar, modul, paket program audio, video dan/atau komputer. Di dalamnya tercakup pula kegiatan pembelajaran dan bentuk-bentuk serta alat penilaiannya. Kurikulumnya dikategorikan sebagai Kurikulum Teknologi atau Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model kurikulum pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam model kurikulum: (1) subyek akademik, yang didasarkan pada teori pendidikan klasik; (2) humanistik, yang didasarkan pada teori pendidikan pribadi; (3) rekonstruksi sosial, yang didasarkan pada teori pendidikan interaksi sosial; dan (4) berbasis kompetensi, yang didasarkan pada teori teknologi pendidikan. Berarti, ditinjau dari model kurikulum, KTSP merupakan penerapan dari model kurikulum berbasis kompetensi, yang didasarkan pada teori teknologi pendidikan.

Sementara itu, model pengelolaan pengembangan kurikulum antara lain dapat dikelompokkan ke dalam model pengelolaan oleh: (1) Pemerintah Pusat, (2) Pemerintah Provinsi, (3) Pemerintah Kabupaten/Kota, (4) Satuan Pendidikan (Widyastono, 1998). Berarti, ditinjau dari model pengelolaan pengembangan kurikulum, KTSP merupakan penerapan dari model pengelolaan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan.

Sedangkan model implementasi kurikulum menurut Snyder, Bolin, & Zumalt (1992, dalam Sukmadinata, 2007) meliputi model: (1) Fidelity, (2) Mutual adaptive, dan (3)

Enachment. Fidelity bercirikan: (a) kurikulum standar, (b) dokumen lengkap dan rinci, (c) implementasi sesuai desain. Mutual adaptive bercirikan: (a) kurikulum inti, (b) materi pokok, (c) guru mengadakan perubahan dan/atau penyempurnaan sesuai kondisi, kebutuhan, dan perkembangan setempat. Enachment bercirikan: (a) kurikulum sekolah, dan (b) guru mengembangkan kurikulum sesuai kondisi, kebutuhan, dan perkembangan setempat. Berarti. ditinjau dari model implementasi kurikulum, KTSP merupakan penerapan dari gabungan model mutual adaptive dan enachment, karena KTSP disusun oleh guru bersama komite sekolah yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, sesuai dengan: (1) tujuan satuan pendidikan, (2) potensi daerah/karaktersitik daerah, (3) sosial budaya masyarakat setempat, dan (4) peserta didik

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa KTSP ditinjau dari model kurikulumnya merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi, yang didasarkan pada teori teknologi pendidikan; ditinjau dari model pengelolaan pengembangannya, merupakan penerapan model pengelolaan pengembangan oleh

satuan pendidikan; sedangkan ditinjau dari model implementasinya merupakan penerapan gabungan model mutual adaptive dan enachment.

# 3. Simpulan dan Saran

## 3.1 Simpulan

- a. Berdasarkan kajian yuridis, kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang pemberlakuan KTSP telah sesuai dengan: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional tentang Pendidikan, (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lululusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Berdasarkan kajian konseptual, kebijakan Departemen Pendidikan

Nasional tentang pemberlakuan KTSP didasarkan pada pilihan dari berbagai model berikut:

(1) ditinjau dari model kurikulum, merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi, yang didasarkan pada teori teknologi pendidikan, (2) ditinjau dari model pengelolaan pengembangan kurikulum, merupakan penerapan model pengelolaan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan; dan (2) ditinjau dari model implementasi kurikulum, merupakan penerapan gabungan model implementasi kurikulum mutual adaptive dan enachment.

#### 3.2 Saran

a. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara politis dan
akademis, setiap mengadakan
pembaharuan pendidikan pada
umumnya, maupun pembaharuan
kurikulum pada khususnya,
Depdiknas hendaknya terlebih
dulu menyusun naskah akademik
yang berisi antara lain tentang
landasan yuridis, landasan
konseptual (teoritis), dan
landasan empiris (hasil kajian
lapangan). Naskah akademik
hendaknya disusun oleh Tim
Profesional, yang menguasai

- kondisi lapangan (fakta empiris) dan teori keilmuan. Menguasai kondisi lapangan saja tidak cukup, tidak akan bisa mengantisipasi perkembangan masa depan, karena pembaharuan kurikulum harus berwawasan ke depan; sebaliknya, menguasai teori keilmuan saja juga masih kurang, karena pembaharuan yang akan diterapkannya pasti akan kurang "membumi". Bila naskah akademik sudah disusun. perlu disosialisasikan kepada para pejabat yang terkait, sehingga setiap pejabat memiliki persepsi yang relatif sama dan dapat memberi jawaban yang relatif sama pula bila ada tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat.
- b. Pembaharuan pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, sebelum diberlakukan secara nasional hendaknya terlebih dulu dilakukan ujicoba secara terbatas (piloting) pada beberapa sekolah dari beberapa daerah. Karena sifatnya masih merupakan tahapan penelitian dan pengembangan, maka yang bertanggung jawab dalam piloting adalah unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Depdiknas.
- c. Piloting hendaknya diikuti dengan riset aksi (action research); menerapkan sambil melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Bagian-bagian yang ditemukan kurang sesuai dengan kondisi lapangan harus segera disempurnakan; kemudian diterapkan lagi, dievaluasi lagi, disempurnakan lagi; demikian seterusnya. Setelah dilakukan evaluasi secara komprehensif dan dinyatakan layak untuk disebarluaskan (didesiminasikan), maka dilanjutkan dengan desiminasi secara terbatas pada sekolah dan daerah yang lebih luas. Kemudian dilakukan evaluasi secara komprehensif lagi; bila hasilnya masih layak untuk disebarluaskan secara meluas, barulah diberlakukan secara nasional.
- d. Sebelum diberlakukan secara nasional perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan. Dalam sosialisasi dan pelatihan, karena sifatnya merupakan tahap pengembangan sekaligus pembinaan maka yang bertanggung jawab adalah unit penelitian dan pengembangan bersama direk-

- torat jenderal yang terkait di lingkungan Depdiknas;
- e. Bila semua unsur telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, maka tahap berikutnya adalah pembinaan. Penanggung jawab pembinaan adalah unit direktorat jenderal yang terkait di lingkungan Depdiknas, misalnya dalam hal pembinaan manajemennya yang

MacMillan Pub. Co. Inc.

bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan dalam hal pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab adalah Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

#### Pustaka Acuan

- Arismunandar, Wiranto. 1996. Sistem Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dalam Era Globalisasi: Pengalaman dan Pemikiran di Institut Teknologi Bandung. Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Balitbang Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Hasan, Hamid. 2000. Kurikulum Masa Depan. Jakarta: Balitbang Depdiknas. Lapp, Dianne, John Bende, & Ellen wood. 1975. Teaching and Learning: Philosophical, Psychological, Curricular Application. New York:
- Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia. 1999. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Savitri. 2007. Kurikulum Highschope: Paper Seminar Kajian Mata Pelajaran. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Seller, W. and Miller, J.P. 1985. Curriculum: Perspective and Practice. New York and London: Longman.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Landasan Teori dan Inovasi dalam KTSP: Teori, Inovasi, dan Operasionalisasi. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Widyastono, Herry. 1998. Kurikulum Pendidikan Tinggi: Kajian Yuridis, Konseptual, dan Empiris. Jakarta: Program Pascasarjana IKIP Jakarta.
- Widyastono, Herry. 1991. Professional Leadership Course. London: University of London.